



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



Verifikasi faktual keanggotaan partai politik

bersama
RAKYAT
AWAS
PEMILU
bersama
BAWASLU Tegakkan
Keadlian

DIVISI :
HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO





TIM PENYUSUN

Pengarah

RUSMI, SH

Penanggung Jawab

JAMIL,S.H.,M.H

Editor

JAMIL,S.H.,M.H

Penulis

JAMIL,S.H.,M.H

ERWIN PRAMUNDITO

ALAMAT KANTOR

Jl. Pahlawan Gg.I No.5 Sidoarjo

Telepon: (031)99723433

Email: set.sidoarjo@bawaslu.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo dapat menyelesaikan laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2022.

Sholawat salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW pemimpin revolusi dunia yang telah menunjukkan kita semua menuju jalan yang diridloi oleh Allah SWT sehingga kita dapat membedakan sesuatu yang baik yang boleh kita lakukan dan hal-hal yang buruk yang harus kita tinggalkan.

BAWASLU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang berfokus pada pengawasan, pencegahan dan penindakan atas terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 2022. Berkat kerjasama internal Kelembagaan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Sidoarjo dan kerjasama eksternal dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sehingga dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

BAWASLU Kabupaten Sidoarjo mengutamakan tindakan preventif dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik serta dengan melakukan sosialisasi secara massif dengan harapan terselenggaranya pemilihan yang demokratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Laporan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan proyeksi dalam Pemilu yang akan datang yang akan datang. Sehingga pelaksanaannya lebih berkualitas dan berintegritas.



Penyelesaian laporan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik ini tidak lepas dari bimbingan dari Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Provinsi Jawa Timur dan bantuan dari jajaran BAWASLU Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat secara aktif dalam penyelesaian laporan Pengawasan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik ini masih jauh dari sempurna yang mungkin terdapat berbagai kelemahan dari substansi isi laporan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka penyempurnaan laporan ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dan semoga kita selalu mendapatkan maghfiroh dari-Nya. Amiin.

Demikian semoga Laporan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum wr. wb.

JAMIL,S.H.,M.H

Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
BAWASLU Kabupaten Sidoarjo



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan Sengketa Proses Pemilu dan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Serta berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan tugas pengawasan di wilayah kerja masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yaitu Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. Sesuai tahapan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo melakukan tugasnya memverifikasi administrasi dan memfaktualkan kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2024.

Dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas agar jalannya pemilihan umum dilaksanakan dengan baik pada tahapan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu RI menyampaikan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penanggung Jawab Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut Bawaslu Kabupaten Sidoarjo membentuk tim fasilitasi pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dengan penanggung jawab adalah Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *(daftar tim fasilitasi terlampir 1)*

Sesuai dengan sub tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, tahapan yang harus di awasi adalah verifikasi administrasi yaitu penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu yang



dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo. Dan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, dengan mendatangi secara langsung kantor partai politik, pengurus partai politik dan keanggotaan partai politik di wilayah Kabupaten Sidoarjo

Maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menyampaikan laporan hasil pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh baik pada sub tahapan verifikasi administrasi dan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

B. TUJUAN LAPORAN

Tujuan disusunnya laporan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tim fasilitasi pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yaitu menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta pertanggungjawaban kepada Masyarakat selama proses tahapan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Tahun 2024. Selain itu juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengawas Pemilihan Umum agar kedepan dapat menjalankan tugas secara ideal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya Pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas;

C. LANDASAN HUKUM

Dalam melakukan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik pengacu Pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang



- Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sitematika penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik adalah :

Bab I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Tujuan Laporan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

Bab II Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik :

- A. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik :
 1. Kerawanan-Kerawanan
 2. Perencanaan Pengawasan
- B. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik :
 1. Pencegahan
 2. Aktivitas Pengawasan
- C. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik :
 1. Temuan



- 2. Rekomendasi
- 3. Tindaklanjut Rekomendasi
- D. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik
- E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Bab III Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Lampiran-lampiran



BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 jadwal tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022. Selama proses pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik KPU telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yaitu :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tanggal 29 Juli 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota DPR dan DPRD
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tanggal 3 September 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota DPR dan DPRD
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364 Tahun 2022 Tanggal 8 September 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan



Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota DPR dan DPRD

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tanggal 23 September 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota DPR dan DPRD

KPU juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 763 Tentang Penggunaan Teknologi informasi dan dokumen persyaratan partai politik, Surat Edaran KPU Nomor 782 : Tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual, Surat Edaran Nomor 987 Tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik dengan Menggunakan Teknologi Informasi.

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, di tingkat kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Sidoarjo hanya melaksanakan tugas verifikasi administrasi dan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Pada Pasal 35 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu adalah :

1. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang di unggah di Sipol;
2. Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
3. Status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
4. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
5. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.



Sudah dilakukan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik, KPU melakukan verifikasi faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, sesuai dengan Pasal 79 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan :

1. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
3. Domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

Untuk membuktikan pemenuhan persyaratan tersebut sesuai pasal 80 :

1. KPU Kabupaten/Kota mendatangi kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
2. Kepengurusan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan Kebenaran ketua, sekretaris dan Bendara yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
3. Verifikasi faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
4. Verifikasi faktual domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.



KPU juga melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024, sesuai pasal 84 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota. Untuk jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Keputusan KPU Nomor 258 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota sebanyak 1.951.723 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga), sehingga syarat dukungan keanggotaan partai politik di Kabupaten Sidoarjo $1/1.000 = 1.952$ (Seribu sembilan ratus lima puluh dua) orang.

Dalam verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik KPU menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dalam menentukan jumlah sampel anggota Partai Politik berdasarkan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik.

KPU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan telah membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik sesuai pasal 89 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan dengan cara :

1. Mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
2. Membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik;
3. Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk



menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual keanggotaan.

6. Kerawanan-Kerawanan

Selama proses verifikasi administrasi dan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memetakan potensi kerawanan pelanggaran dan potensi kerawanan terjadinya sengketa yaitu:

- a. KPU dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tidak sesuai juknis
- b. KPU dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tidak sesuai jadwal yang ditentukan
- c. KPU dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik memihak salah satu partai politik

7. Perencanaan Pengawasan

8.

B.

A. Dokumen Perencanaan

Perencanaan program kerja divisi hukum humas dan data informasi badan pengawas pemilu tahun 2021 antara lain



BAGIAN III

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama menghadapi Pemilu –Pemilihan agar berjalan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan. Adapun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.

1. Hubungan Masyarakat

Adapun untuk meningkatkan partisipasi, masyarakat terus proaktif untuk memantau dan melaporkan hal yang menyangkut dengan bisa menurunkan demokrasi, dengan mengakses media yang sudah disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Mulai dari memantau dimedia sosial Bawaslu melalui Instagram, youtube, twiter dan website.

2. Hukum

a. Advokasi & Bantuan Hukum

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dari awal proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 telah memfasilitasi permintaan bantuan hukum berupa anggaran Pada tahun 2020-2021, Namun sepanjang tahun 2020 -2021 tidak terdapat hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum terkait penanganan masalah hukum yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

b. Dokumentasi Hukum

Jaringan JDIH Bawaslu. Sepanjang Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah mengunggah data di PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5 (lima) diantaranya berbentuk buku laporan kinerja Tahun 2020 dari Divisi, Hukum, Humas, Data dan Informasi, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Laporan Kerja Layanan Informasi Publik.

c. Penyiapan Analisis & Kajian Hukum

Sepanjang tahun 2020 - 2021 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan analisis dan kajian hukum perihal peraturan baik Undang-Undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) antara lain, Pertama: Undang undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang. Kedua: PKPU Nomor : 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

d. Sosialisasi Produk Hukum

Sepanjang Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah membuat *MoU* dengan berbagai elemen masyarakat untuk mensosialisasikan produk



hukum diantaranya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Delta Sidoarjo, Lembaga Pendidikan Maarif Kab. Sidoarjo dan Dewan Pemuda Sidoarjo, serta produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Sidoarjo sepanjang tahun 2021 bisa diakses masyarakat melalui,

3. Data informasi

a. Pelayanan data dan pelayanan informasi

Agar dapat menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mensosialisasikan produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 baik kepada pasangan calon, partai politik pengusung pasangan calon, stakeholders maupun masyarakat umum melalui organisasi kemasyarakatan, LSM dan awak media.



- b. Sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan rapat koordinasi internal dengan jajaran *ad-hoc* ditingkat kecamatan baik yang dilakukan secara luring (sebelum penerapan protokol kesehatan) maupun secara daring (pada saat penerapan protokol kesehatan).
- c. Selain rapat koordinasi internal dengan jajaran *ad-hoc* ditingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga aktif menghadiri undangan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring. Kegiatan rapat koordinasi sepanjang tahun 2020 – 2021 baik yang dilaksanakan secara luring maupun secara daring, sebanyak 12 (dua belas) kegiatan. 3 (tiga) diantaranya diadakan secara luring atau tatap muka.
- d. Dalam mensosialisasikan produk hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk memudahkan masyarakat mengakses dokumen serta informasi yang dibutuhkan selama itu tidak termasuk informasi yang dikecualikan, masyarakat dapat mengakses dengan mudah lewat JDIH Bawaslu. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada semua masyarakat yang membutuhkan data dan informasi yang dibutuhkan.



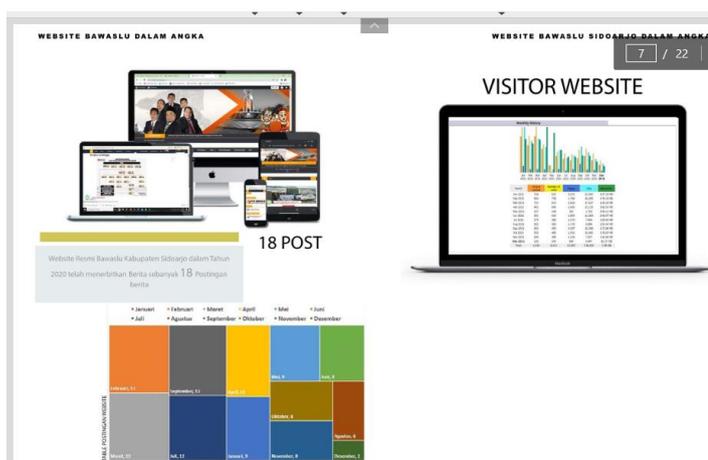
Keberadaan Bawaslu menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan atas dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan yang dilakukan selama tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 baik oleh peserta pemilu/pemilihan maupun oleh penyelenggara sesuai tingkatannya dan badan ad-hoc di wilayahnya.

Agar dapat menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mensosialisasikan produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 baik kepada pasangan calon, partai politik pengusung pasangan calon, stakeholders maupun masyarakat umum melalui organisasi kemasyarakatan, LSM dan awak media.



a) Website

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.



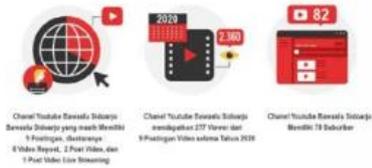
C. Publikasi dan Pemberitaan Media Sosial

Adapun produk hukum dan pemberitaan yang disosialisasikan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021 sebanyak 8 (delapan) Produk Hukum diantaranya terkait dengan putusan putusan yang sudah dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melalui kajian terhadap laporan dan temuan Pelanggaran yang dijumpai sampai pada tahun 2021.





9 POST 2.360 VIEWER 82 SUBCRIBE



BAWASLU SIDOARJO





BAB IV

HUKUM

1. Advokasi Dan Pendokumentasian Hukum

a. Advokasi

Bantuan hukum diberikan kepada jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau badan ad-hoc dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum dilakukan secara terkoordinir agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib dan bertanggungjawab sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Bantuan Hukum sendiri diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor : 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi. Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat memberikan bantuan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota



Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Peranan Bawaslu dalam menghadapi polemik Pemilu juga harus melindungi lembaga internalnya yang terjerat perkara dalam proses pelaksanaan tugas. Berbagai perkara yang dihadapi oleh Bawaslu memungkinkan adanya pihak-pihak yang tidak berkenan hingga jajaran Bawaslu terjerat dalam masalah hukum. kegiatan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di Pengadilan, serangkaian tindakan yang dilakukan lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar Pengadilan.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dari awal proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 telah memfasilitasi permintaan bantuan hukum berupa anggaran Pada tahun 2021,

b. Pendokumentasin Hukum

Namun sepanjang tahun 2020-2021 tidak terdapat hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.



c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

JDIH merupakan tempat fasilitasi masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang produk hukum yang sudah dibuat oleh Lembaga. Sampai pada tahun 2021 sebanyak 18 data yang diunggah Bawaslu Sidoarjo di JDIH, diantaranya tahun 2020 sebanyak 15 (lima belas) data putusan dan 3 (tiga) data *Memorandum of Understanding (MoU)* pada 2021.

Sepanjang Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah membuat *MoU* dengan berbagai elemen masyarakat untuk mensosialisasikan produk hukum diantaranya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Delta Sidoarjo, Lembaga Pendidikan Maarif Kab. Sidoarjo dan Dewan Pemuda Sidoarjo, serta produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Sidoarjo sepanjang tahun 2021 bisa diakses masyarakat melalui Jaringan JDIH Bawaslu.



Tabel 2. Data Dokumen Hukum dan Data Dokumen Unggah Jdih				
No	Tahun	Jenis	Judul	Link JDih
		(putusan/ monografi/ artikel/ buku penelitian/ pengkajian / naskah akademis)		
1.	2021	MOU	Nomor. 018/PM.05/KJI24/12/2021 Perjanjian kerjasama dengan DEWAN PEMUDA Kab. Sidoarjo tentang Pendidikan politik hukum dan demokrasi	https://jdih.bawaslu.go.id/peperaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&perpage=5
2.	2021	MoU	Nomor. 017/PM.05/KJI24/06/2021 Perjanjian kerjasama dengan LP. Maarif Kab. Sidoarjo tentang Pendidikan politik hukum dan demokrasi	https://jdih.bawaslu.go.id/peperaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&perpage=5
3.	2021	MoU	Nomor. 016/PM.05/KJI24/05/2021 Perjanjian Kerjasama Dengan Aliansi Bem Delta Sidoarjo Tentang Pendidikan Politik Hukum Dan Demokrasi	https://jdih.bawaslu.go.id/peperaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&perpage=5
4.	2019	Putusan	Nomor : 01/Ps.Reg/16.33/1/2019 Tahun 2019 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peperaturan/1786194997/putusan-penyelesaian-sengketa-pemilu-komisi-pemilihan-umum-kpu-kabupaten-sidoarjo.html
5.	2018	Putusan	Nomor 05/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/IX/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Atas Nama Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peperaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&perpage=5

6.	2018	Putusan	Nomor 04/Ps.Reg/16.33/IX/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&perpage=5
7.	2018	Putusan	Nomor 03/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/Viii/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&perpage=5
8.	2018	Putusan	Nomor 01/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&perpage=5
9.	2018	Putusan	Nomor :02/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&perpage=5
10	2018	Putusan	Nomor 02/Lp/Adm/Bwsl.Kab.16.33/Vii/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&perpage=5
11	2018	Putusan	Nomor 01/Lp/Adm/Bwsl.Kab.16.33/Vii/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penanganan	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&perpage=5



			Pelanggaran Administrasi Pemilu Ketua Dan Anggota Kpu Kabupaten Sidoarjo	page=5
--	--	--	--	--------



1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Perbawaslu Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Informasi Publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Perbawaslu No 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Perbawaslu No 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip dilingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Sepanjang Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah mengunggah data di PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5 (lima) diantaranya berbentuk buku laporan kinerja Tahun 2020 dari Divisi, Hukum, Humas, Data dan Informasi, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Laporan Kerja Layanan Informasi Publik.

Tabel 3. Data Dokumen Hukum yang tersedia di PPID pada tahun 2020 - 2021				
Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link	Keterangan
	(putusan, monografi, artikel, buku, penelitian, pengkajian, atau naskah akademis)			
2020	Buku	Laporang Akhir Humas Tahun 2020	https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/informasi-kegiatan-dan-kinerja-bawaslu-sidoarjo/	
2020	Buku	Laporan Akhir Hukum, Data dan Informasi Tahun 2020	https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/informasi-kegiatan-dan-kinerja-bawaslu-sidoarjo/	
2020	Buku	Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Tahun 2020	https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/informasi-kegiatan-dan-kinerja-bawaslu-sidoarjo/	
2020	Buku	Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Tahun 2020	https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/informasi-kegiatan-dan-kinerja-bawaslu-sidoarjo/	
2020	Buku	Laporan Akhir Layanan Informasi Publik Tahun 2020	https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/informasi-kegiatan-dan-kinerja-bawaslu-sidoarjo/	

2. Analisis dan Perundang-undangan

Sepanjang tahun 2020 - 2021 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan analisis dan kajian hukum perihal peraturan baik Undang-Undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang.
2. PKPU Nomor : 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
3. PKPU Nomor : 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
4. PKPU Nomor : 18 tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
5. PKPU Nomor : 1 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Walikota

dan Wakil Walikota.

6. PKPU Nomor : 5 tahun 2020 perubahan ketiga atas PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
7. PKPU Nomor : 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (covid 19).
8. Perbawaslu Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Perbawaslu Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Serta membahas pemberian data informasi yang dikecualikan dalam melakukan penanganan pelanggaran.



Tabel 4.
Data Analisis dan Kajian Hukum sepanjang tahun 2020 s/d 2021

Tahun	Judul Analisis	Keterangan
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran hukum lain (pidana) nomor register 01/TM/PB/Kab/16.33/I/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran nomor register (bukan pelanggaran) 02/REG/TM/PB/KEC.TGA/16.33/XI/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.BLD/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.BDR/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.CND/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.GDG/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.JBN/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.KRB/16.33/X/2020	

2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.KRN/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.PRG/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.PRB/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.SDT/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.SDA/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.SKD/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.TMN/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.TGA/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.TRK/16.33/X/2020	

2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.TLG/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.WRU/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.WNY/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran pidana nomor register 02/TM/PB/KAB.SDA/16.33/XI/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran kode etik nomor register 01/LP/PB/KAB.SDA/16.33/XI/2020	
2020	Kajian hukum Pemuktahiran Data Pemilih diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2020	

Tabel 5
Sosialisasi Produk Hukum

No	Tahun	Jenis	Judul	Link JDIH
		(putusan/mo nografi/ artikel/buku/ penelitian/ pengkajian/n askah akademis)		
1	2019	Putusan	Nomor : 01/Ps.Reg/16.33 /I/2019 Tahun 2019 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1786194997/putusan-penyelesaian-sengketa-pemilu-komisi-pemilihan-umum-kpu-kabupaten-sidoarjo.html
2	2018	Putusan	Nomor 05/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/IX/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5

			Penyelesaian Sengketa Pemilu Atas Nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	
3	2018	Putusan	Nomor :04/Ps.Reg/16.33/IX/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
4	2018	Putusan	Nomor : 03/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5



			Sidoarjo	
5	2018	Putusan	Nomor : 01/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
6	2018	Putusan	Nomor :02/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemmilihan	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5



			Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	
7	2018	Putusan	Nomor : 02/Lp/Adm/Bwsl. Kab.16.33/Vii/201 8 Tahun 2018 Tentang Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
8	2018	Putusan	Nomor :01/Lp/Adm/Bwsl. Kab.16.33/Vii/201 8 Tahun 2018 Tentang Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Ketua Dan Anggota Kpu Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5

Tabel 6
RENCANA KERJA DIVISI H2DI T.A 2022
(LURING)

No	Program	Sasaran	Output	Pese rta	Fre kue nsi	Penerima Manfaat
1.	Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum	Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif	Peningkatan kualitas manajemen administrasi dan pelayanan public yang efektif, efisin, akuntabel, prima dan profesional	20	1	masyarakat pada umumnya dan instansi - instansi terkait khususnya stakeholder
2.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Serta Pengelolaan Kehumasan, peliputan dan dokumentasi	. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi Dan Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan	Peningkatan kualitas manajemen administrasi dan pelayanan public yang efektif, efisin, akuntabel, prima dan profesional	20	2	masyarakat pada umumnya dan instansi - instansi terkait khususnya stakeholder

		efektif				
3.	Pengelolaan dan Pelayanan data dan informasi publik		Persentase jumlah Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi demi tercapainya keterbukaan informasi public	15	1	masyarakat pada umumnya dan instansi - instansi terkait khususnya stakeholder
4.	Pengelolaan dan pelayanan data informasi publik	Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi hukum	Jumlah layanan pengelolaan data dan informasi public	15	1	
KEGIATAN NON BUDGET (DARING)						
1	Diskusi hukum tema	Terwujudnya pemanfaatan	Terwujudnya layanan	100	1	masyarakat pada



	pencalonan anggota DPD	penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi	kehumasan yang progresif			umumnya dan instansi - instansi terkait khususnya stakeholder
2	Sosialisasi undang-undang ttg pembentukan PTPS	Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan	Terwujudnya layanan kehumasan yang progresif	100	1	masyarakat pada umumnya dan instansi - instansi terkait khususnya stakeholder
3	Diskusi hukum (hybrid) tema pembentukan PTPS	Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan	Terwujudnya layanan kehumasan yang progresif	100	1	masyarakat pada umumnya dan instansi - instansi terkait khususnya stakeholder

